



2024



# LAPORAN KINERJA (LKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN



Alamat

Jl. A. Yani Km.2,5 Paringin Selatan

Kabupaten Balangan

71618

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	
Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	3
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	8
2.2 Rencana Kerja .....	12
2.3 Perjanjian Kinerja.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.3 Realisasi Anggaran.....	39
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	43
3.5 Kinerja Lainnya .....	45
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>

## Kata Pengantar

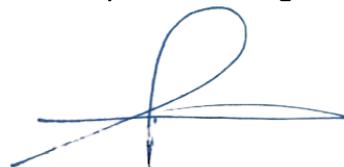
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023. LKIP merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

LKIP bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Paringin, Februari 2025

Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Balangan



**H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd., MM**

Pembina Tk.I/IVB

NIP. 19670403 1994 1 015

## Ringkasan Eksekutif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan administrasi badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memiliki 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2024.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai dan mendapatkan predikat “Sangat Memuaskan”, yaitu dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, Indikator 1 (satu) indikator yaitu Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan dengan capaian sasaran sebesar 100%. Dan Sasaran Kedua dengan 1 (satu) Indikator yaitu Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dengan capaian 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas

SKPD. Untuk Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance dan clean governance.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan sasaran dari Reformasi Birokrasi. Dalam Good Governance dituntut manajemen berbasis kinerja yakni dari menetapkan tujuan, pengukuran, target dan mengaitkan tujuan dan sasaran serta adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing – masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan suatu laporan yang dicapai instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pemerintah daerah maupun Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Balangan Tahun 2024:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2024.

Berikut adalah tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024:

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 kepada seluruh stakeholder.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja

### **1.4 Gambaran Umum SKPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah Badan Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2,); dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

##### **a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati

Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pelaksanaan administrasi badan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Daerah terkait tugas dan fungsinya

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan , terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
  1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
  2. Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan;

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari:

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan:



### 3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Manusia**

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	1
4.	Jabatan Fungsional	5
5.	Pelaksana	8
6.	Non PNS	37
<b>Total</b>		<b>55</b>

#### 4. Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik sosial
2. Rendahnya ketahanan sosial, budaya dan agama di masyarakat
3. Rendahnya wawasan politik masyarakat
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap ormas yang ada di Kabupaten Balangan

#### **1.5 Sistematika Penyusunan Laporan**

Berikut adalah sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum SKPD
- 1.5 Sistematika Penyusunan Laporan

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- 2.2 Rencana Kerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.5 Kinerja Lainnya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

#### **1. Visi dan Misi Kabupaten Balangan**

Pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Balangan memiliki Visi dan Misi, yaitu:

##### **❖ Visi**

Visi Kabupaten Balangan adalah “MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”.

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan

masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

❖ Misi

Untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan serta Pariwisata Kreatif;
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara;
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.

2. Tujuan SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Angka Konflik Sosial Bemuansa SARA

3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan memiliki sasaran strategis yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan
Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam mewujudkan sasaran strategis maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan mengambil strategi, yaitu:

1. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
  2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
  4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  5. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Matriks Renstra 2021-2026

Matriks Renstra 2021-2026 yang memuat target dan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Matriks Renstra 2021-2026**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pemetaan Daerah	Persentase Daerah Rawan	Jumlah Daerah Potensi	100	100	100	100	100	100

Potensi Konflik	Konflik yang Terpetakan	Konflik yang dipetakan / Jumlah Daerah Potensi Konflik x100%						
Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Wawasan Politik / Jumlah Pemilih Tetap x 100%	1,2	2,9	7,8	12,6	17	21,3

5. Keterkaitan RPJMD 2021-2026 dengan Renstra 2021-2026

Adapun keterkaitan RPJMD 2021-2026 dengan Renstra 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**Keterkaitan RPJMD 2021-2026 dengan Renstra 2021-2026**

<b>RPJMD Kabupaten Balangan</b>	<b>Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
Visi	Tujuan
Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan
Misi 5	Sasaran
Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	1. Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik 2. Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat
Tujuan	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama Serta Pemerintahan Yang Harmonis Dan Kondusif	1. Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan 2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Sasaran	
Terjaganya Kehidupan Sosial Yang	

Kondusif	
----------	--

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan Misi ke- 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif dengan tujuan Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif untuk mencapai sasaran Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif.

#### 6. Program Prioritas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki beberapa program prioritas:

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

### 2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Penyesuaian 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, dengan tujuan Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan untuk mencapai sasaran :

1. Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik
2. Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat

**Tabel 2.4**  
**Perencanaan Kinerja Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024

Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%
		Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	12,6%

Dari tabel perencanaan kinerja tahun 2024, Target kinerja persentase daerah rawan konflik yang terpetakan sebanyak 100% dan Tingkat partisipasi politik Masyarakat sebesar 12,6%.

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah pada tahun 2024 sesuai dengan Renja Murni tahun 2024 sebesar Rp.52.247.838.216,00 dan mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp.3.048.892.751,00 pada Renja Perubahan tahun 2024 menjadi Rp.55.296.730.967,00.

Anggaran tersebut mendanai beberapa Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 5) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
    - 6) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
    - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

- Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
    - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
    - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
    - 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

**2.3 Perjanjian Kinerja**

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kepala Badan**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
1.	Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik	Persentase Daerah Rawan Konflik yang	100%	100%	-

		Terpetakan			
2.	Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	12,6%	12,6%	-

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Sekretaris**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku, Ras/Etnis dan Antar Golongan yang Tertangani	1 Angka	1 Angka	-
2.	Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	1 Angka	1 Angka	-

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila dan	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku, Ras/Etnis dan Antar	1 Angka	1 Angka	-

	Wawasan Kebangsaan	Golongan yang Tertangani			
2.	Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	1 Angka	1 Angka	-

**Tabel 2.8**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
1.	Meningkatnya Peran Ormas dalam Pencegahan Potensi Konflik	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100%	-
2.	Meningkatnya Peran Partai Politik dalam Peningkatan Wawasan Politik Masyarakat	Persentase Parpol yang Aktif	100%	100%	-

**Tabel 2.9**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
1.	Meningkatnya Penyelesaian	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	100%	100%	-

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan menggunakan pengklasifikasian sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017, seperti tampak pada tabel berikut:

NO	KATEGORI CAPAIAN	ANGKA INTERPRETASI
1.	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	Memuaskan
3.	>70 – 80	Sangat Baik
4.	>60 – 70	Baik
5.	>50 – 60	Cukup Baik
6.	>30 – 50	Kurang
7.	>0 - 30	Sangat Kurang

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat

capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2024. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan tujuan strategis dalam upaya mencapai sasaran strategis tahun 2021-2026, dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Tujuan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN S.D 2024
			2023	2024	
Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	100%

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tidak terjadi konflik sosial bernuansa SARA di Kabupaten Balangan, sehingga indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai 100% dengan interpretasi "Sangat Memuaskan".

Dibandingkan tahun 2023 dengan capaian 100%, realisasi dan capaian pada tahun 2024 adalah adalah tetap atau tidak mengalami perubahan.

Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berdasarkan hasil pengukuran kinerja disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTERPRETASI
<b>Sasaran Strategis 1:</b>				
<b>Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik</b>				
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
<b>Sasaran Strategis 2:</b>				
<b>Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat</b>				

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	12,6%	12,6%	100%	Sangat Memuaskan
--	-------	-------	------	------------------

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kedua indikator kinerja utama berhasil mencapai realisasi dan cakupan sesuai yang telah ditargetkan pada tahun 2024 yaitu 100% sehingga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan mendapatkan interpretasi “Sangat Memuaskan”.

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dengan capaian rata-rata 100% dengan katagori Sangat Memuaskan.

Berikut adalah uraian dan analisis dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024:

#### 1. Analisis Capaian Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan

Sasaraan Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan

#### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja**  
**Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTERPRETASI
<b>Sasaran Strategis 1:</b>				
<b>Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik</b>				
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data pada tabel dia atas dapat diketahui bahwa target kinerja dapat tercapai dengan “Sangat Memuaskan” yaitu sebesar 100%.

Pemetaan daerah rawan konflik dilakukan pada 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dengan hasil 6 daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dari 2 daerah lainnya yang dapat berpotensi konflik.

Kerawanan dimaksud berkaitan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2024. Selanjutnya potensi tersebut berhasil diredam dan tidak berkembang menjadi konflik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target, yaitu:

1. Menyusun draft dokumen kebijakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dokumen yang dimaksud adalah draft dokumen-dokumen peraturan Kepala Daerah terkait pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu Penanganan Konflik Pemerintah Daerah (Timdu Penanganan Konflik), Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM), Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin), Tim Pemantauan Orang Asing (Timpora), Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (TKDM), Forum Perangkat Daerah (Forkopimda),

2. Melibatkan masyarakat dan aparat keamanan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi potensi ancaman.

Rapat koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari masyarakat, APH, Kodim, dan Kejaksaan.

3. Peningkatan kerjasama antar pemangku kebijakan, lembaga intelijen dan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda dan perwakilan dari BINDA. Kegiatan dilaksanakan sebanyak dua kali selama tahun 2024 dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan terkait kesinambungan kerjasama dalam mencapai sasaran strategis.

4. Pelaksanaan kegiatan bersama forum-forum dan gugus tugas masyarakat dalam rangka upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik bernuansa SARA.

Kegiatan berupa rapat koordinasi dan sosialisasi bersama forum-forum yang telah ditunjuk seperti Dewan Harian Cabang (DHC) 45, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan dilaksanakan dengan berbagai metode seperti rapat bulanan dan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.

5. Pelaksanaan monitoring yang intens terhadap aktifitas-aktifitas di daerah dan memastikan respon yang cepat terhadap isu-isu yang muncul.

Dalam hal ini monitoring dilaksanakan dengan pemaantauan langsung ke lokasi yang terindikasi terdapat aktifitas yang terdapaat isu-isu dan berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Pemantauan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Balaangan dengan mengikuti agenda kegiatan di daerrah dan berdasarkan informasi kejadian berpotensi konflik.

6. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan potensi konflik untuk meredam kemungkinan berkembangnya situasi ke arah yang tidak diinginkan.

Kegiatan berupa rapat koordinasi dengan unsur tim terpadu penanganan konflik guna membahas permasalahan yang terjadi dan mencari solusi atas masalah tersebut. Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Indikator persentase daerah rawan konflik yang terpetakan ini didapat menggunakan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan} &= \frac{\text{Jumlah Daerah Potensi Konflik yang Terpetakan}}{\text{Jumlah Daerah Potensi Konflik}} \times 100 \\ &= \frac{8 \text{ Kecamatan}}{8 \text{ Kecamatan}} \times 100 \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara Capaian Kinerja dalam Beberapa Tahun Terakhir  
Guna mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut adalah tabel data perkembangan empat tahun terakhir pelaksanaan rencana kerja untuk mencapai target indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan:

**Tabel 3.4**

**Perbandingan antara Capaian Kinerja dalam Beberapa Tahun Terakhir**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
2021	100%	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%	100%

2024	100%	100%	100%	100%
------	------	------	------	------

Kinerja atas target Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan selalu konsisten mencapai 100% sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya komitmen dan Upaya yang konsisten dari berbagai pihak dalam mengelola dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan kewaspadaan nasional serta konflik sosial di Kabupaten Balangan.

- c. Perbandingan Kinerja Kumulatif Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam melaksanakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan periode 2021-2026. Perbandingan capaian kinerja kumulatif dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Kinerja Kumulatif dengan Target Akhir Renstra**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>	<b>CAPAIAN</b>
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 telah berhasil mencapai target akhir Renstra. Untuk selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan akan mengupayakan agar dapat selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten Lain atau Standar Nasional

IKU yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berbeda dengan Kabupaten/Daerah lain sehingga tidak dapat diperbandingkan.

IKU yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan adalah Persentase Penanganan Konflik Sosial. Indikator ini berbeda dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Badan Kesatuan Bangsa berada dibawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sehingga tidak ditemukan IKU khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

#### ❖ Pendorong Keberhasilan

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak guna mencapai target kinerja Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Komitmen pimpinan dan keterlibatan pemangku kebijakan (stakeholder).

Salah satu bentuk komitmen pemangku kebijakan adalah terbitnya peraturan-peraturan atau juknis yang mendukung kegiatan, serta terselenggaranya anggaran yang mendukung upaya pencapaian target.

2. Pembentukan dan penguatan forum kewaspadaan

Forum-forum yang telah terbentuk yaitu:

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Pemerintah Daerah (Timdu Penanganan Konflik)
3. Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM)
4. Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)
5. Tim Pemantauan Orang Asing (Timpora)
6. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (TKDM)
7. Forum Perangkat Daerah (Forkopimda)

3. Koordinasi yang efektif antar Lembaga, forum dan gugus tugas

Rapat koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari masyarakat, APH, Kodim, dan Kejaksaan.

4. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan

Dalam hal ini monitoring dilaksanakan dengan pemantauan langsung ke lokasi yang terindikasi terdapat aktifitas yang terdapat isu-isu dan berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Pemantauan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Balaangan dengan mengikuti agenda kegiatan di daerah dan berdasarkan informasi kejadian berpotensi konflik

#### ❖ Hambatan

Meskipun target telah tercapai dengan baik, namun pada proses pencapaian tetap ditemukan beberapa hambatan yang berisiko menghambat keberhasilan. Hambatan tersebut diantaranya:

1. Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan  
Keterbatasan dalam hal jumlah ketenagaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan di lapangan. Dengan keterbatasan tenaga pelaksana tersebut, beberapa SDM belum memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan.
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat  
Kurangnya informasi dan wawasan di masyarakat tentang kewaspadaan dan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan hambatan dan gangguan yang mungkin muncul sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran dan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat
3. Keterlambatan informasi serta masifnya penyebaran informasi rekayasa (hoax) sehingga dapat memperburuk situasi dan memicu adanya konflik.  
Keterlambatan informasi dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sesuatu yang berpotensi ancaman. Masyarakat menganggap sesuatu sebagai hal yang wajar meskipun pada dasarnya merupakan potensi ancaman konflik yang dapat berkembang menjadi konflik di masyarakat tersebut.

❖ Alternatif Solusi

Berdasarkan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, maka muncullah beberapa pemikiran sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga diharapkan di kemudian hari masalah serupa tidak akan timbul lagi. Alternatif solusi tersebut antara lain:

1. Mengupayakan pemenuhan SDM yang kompeten melalui penambahan SDM atau pelatihan maupun diklat bagi SDM yang telah tersedia.
  2. Meningkatkan upaya sosialisasi dan pendidikan wawasan kebangsaan untuk membuka kesadaran masyarakat
  3. Mengoptimalkan komunikasi maupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga informasi dapat lebih cepat terkumpul dan informasi rekayasa dapat diredam sebelum tersebar luas
- f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan ditunjang oleh 4 program, 4 kegiatan.

Berikut adalah uraian program dan kegiatan yang menunjang Indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan:

**Tabel 3.6**  
**Kinerja Program Penunjang**  
**Indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan**

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku, Ras/Etnis dan Antar Golongan yang Tertangani	1 Laporan	1 Laporan	100%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Angka potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Tertangani	1 Laporan	1 Laporan	100%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 4 program yang menunjang Indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan, seluruhnya telah berhasil mencapai target 100%.

Capaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh bidang terkait untuk mencapai target. Kegiatan tersebut yaitu:

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, yang didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Strategi yang telah dijalankan dalam program ini untuk mendukung capaian indikator tersebut adalah:

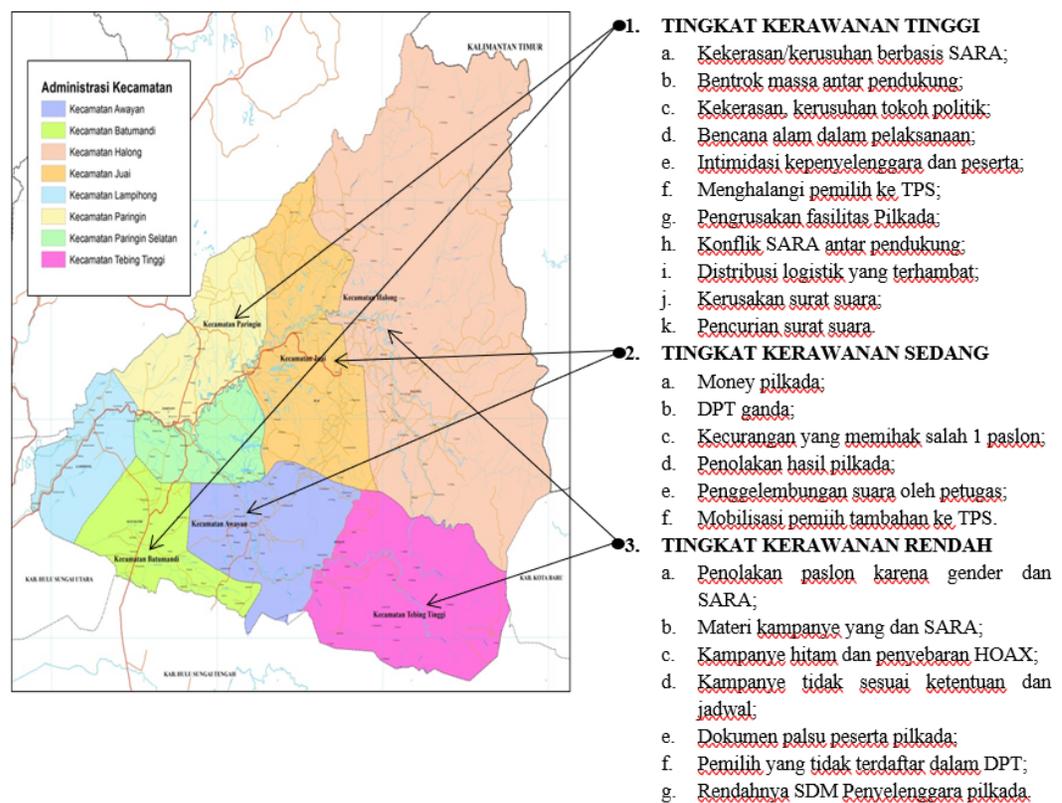
1. Rapat koordinasi dan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat dan aparat keamanan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi potensi ancaman
2. Peningkatan kerjasama antar lembaga intelijen dan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik
3. Pelaksanaan monitoring yang intens terhadap situasi keamanan di berbagai daerah, memastikan respons yang cepat terhadap isu-isu yang muncul
4. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Tahun 2024 merupakan tahun politik karena adanya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga diperkirakan terjadi kerawanan. Kerawanan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Masa tenang dan kampanye
  - a. Politik uang
  - b. Ujaran Kebencian
  - c. Politik Identitas
  - d. Informaasi Rekayasa
  - e. Penggunaan Fasilitas Negara dalam kegiatan kampanye
  - f. Netralitas ASN, TNI/Polri serta penyelenggara Pemilu
  - g. Kampanye diluar jadwal/dapil
  - h. Penyelenggara Prokes
  - i. Sumber dana yang tidak jelas/fiktif
2. Distribusi logistik Pemilu
  - a. Kurangnya salah satu logistik Pemilu seperti surat suara, kotak suara, tinta dll
  - b. Tidak adanya tempat penyimpanan logistik Pemilu
  - c. Terhambatnya logistik Pemilu karena medan yang cukup sulit menuju lokasi TPS
3. Pemungutan dan Penghitungan suara

- a. Politik uang
- b. Kurangnya SDM penyelenggara Pemilu seperti pengisian berita acara rekapitulasi perolehan suara sehingga kegiatan menjadi terhambat
- c. Manipulasi dalam penghitungan suara dengan merubah hasil berita acara rekapitulasi
- d. Minimnya partisipasi pemilih datang ke TPS
- e. Tinggi hasil suara tidak sah dalam Pemilu disebabkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya suara yang diberikan

Berikut hasil pemetaan konflik (conflict mapping) tahun 2024



2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
 Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas daerah untuk meningkatkan peran fungsi Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mengawal stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Adapun peningkatan peran fungsi tersebut dilakukan antara lain melalui:
  1. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan:
    - a) Rawan konflik sosial antara lain berlatar sengketa lahan pertambangan/ perkebunan/perhutanan, perbatasan antar

daerah, sengketa daerah induk dengan otonom baru, SARA, Pilkada;

- b) Terorisme antara lain kelompok ISIS , kelompok radikal;
- c) Penyakit masyarakat antara lain narkoba, prostitusi, miras;
- d) Pengawasan orang/ lembaga asing
- e) Daerah rawan bencana

2. Penerbitan laporan oleh SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik berkaitan dengan aspek pada angka 1 permasalahan-permasalahan lain, misalnya permasalahan hukum yang berpotensi menimbulkan polemik di daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Daerah untuk membuat kebijakan;

Kemudian secara berjenjang Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan laporan kepada Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Pemerintah Provinsi menyampaikan informasi dan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Beberapa peristiwa yang terjadi di Kabupaten Balangan, antara lain:

- Pergeseran WNA Jama'ah Tabligh yang berasal dari Bangladesh dalam rangka Syiar Agama dari Kab. Tabalong ke Kab. Balangan
- Kegiatan Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M Bersama Bupati Balangan
- (POLITIK/HUKUM/PEMERINTAHAN)
- Pergeseran Logistik Pemilu 2024 Dari KPU Kab. Balangan Menuju KPU Provinsi Kalsel,
- Rapat Paripurna DPRD Kab.Balangan Ke-4 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024 Agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2023
- (EKONOMI)
- Pengecekan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Harga Sembako Menjelang Ramadhan 1445 H tahun 2024
- Kegiatan Musrenbang Tahun 2024 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 Percepatan Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan

- (SOSIAL DAN BUDAYA)
- Apel gelar Pasukan Operasi Keselamatan Intan Ta. 2024 Dan Aksi Keselamatan Jalan di Kab. Balangan
- Pengukuhan & Sosialisasi Pengelolaan Wakaf Uang dan Aset Wakaf di Kab.Balangan
- Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Mandiri Kabupaten Balangan Layak Anak Tahun 2024 di Kab.Balangan
- Pamit Kenal Dandim 1001/Hsu-Blg (Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja,S. Sos. M. I. Pol. dan Letkol Kav Gunantyo Ady Wiyawan ,S.Hub.Int Bersama Forkopimda Balangan serta Jajaran di Kab.Balangan
- Kegiatan Pembukaan Pasar Ramadhan 1445 H di Kab. Balangan
- Kegiatan Penyerahan Bantuan Pangan di Desa Marias Kec.Juai Kab.Balangan
- Kegiatan Rembuk Stanting Tingkat Kab.Balangan Ta 2024
- Kegiatan Safari Ramadhan 1445 H/ 2024M Bersama Bupati Balangan
- kegiatan Pelantikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Masa Jabatan 2024-2030
- (HANKAM)
- Rapat Koordinasi Potensi Konflik Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2024
- Situasi Kabupaten Balangan dalam keadaan aman dan kondusif

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Strategi yang telah dijalankan dalam program ini untuk mendukung capaian indikator tersebut adalah:

1. Sosialisasi terkait pendaftaran ormas

Sosialisasi tentang prosedur pendaftaran ormas dilaksanakan dengan cara mengumpulkan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Balangan. Terdaftaranya ormas mempermudah dalam pemantauan dan pengawasan aktifitas ormas sehingga dapat mendeteksi secara dini apabila terdapat aktifitas yang berpotensi konflik.

Berikut adalah tabel klasifikasi ormas Kabupaten Balangan yang telah terdaftar dalam database Kemendagri dan Kemenkumham:

**Tabel 3.7****Sebaran Ormas Kabupaten Balangan yang Terdaftar**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Ormas</b>
Paringin	19
Paringin Selatan	18
Lampihong	9
Batumandi	8
Awayan	8
Tebing Tinggi	0
Juai	3
Halong	5
Total	70

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ormas-ormas tersebar di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Balangan.

**Tabel 3.8****Klasifikasi Ormas Kabupaten Balangan**

<b>Bidang Kegiatan</b>	<b>Jumlah Ormas</b>
Keagamaan	4
Profesi	3
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1
Sosial Kemasyarakatan	8
Sosial, Kemanusiaan dan Kebencanaan	23
Pendidikan	4
Sosial Kemsyarakatan (Olahraga)	2
Olahraga Tradisional	1
Kepemudaan	2
Perkumpulan	8
LSM	10
Sumber Daya Manusia	1
Ekonomi, Hobi, Minat atau Bakat dan Sumber Daya	1
Total	70

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa ormas di Kabupaten Balangan terbagi dalam berbagai bidang kegiatan.

Untuk kelancaran pendaftaran ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan melakukan sebuah terobosan untuk menggunakan sistem jemput bola bagi ke lokasi ormas yang akan

mendaftar. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah ormas yang berdomisili di lokasi yang jauh maupun sulit untuk mendaftar. Seluruh ormas yang akan mendaftarkan diri mendapatkan sosialisasi dan informasi terkait prosedur pendaftaran.

## 2. Pengawasan ormas

Strategi selanjutnya dalam mendukung tercapainya target Indikator yaitu pengawasan terhadap ormas yang ada di Kabupaten Balangan. Pengawasan dilakukan terhadap ormas yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya kewaspadaan dini terhadap aktifitas yang berpotensi konflik sosial. Pengawasan terhadap ormas dilakukan secara berkala, dilaksanakan setiap triwulan.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pengawasan ormas yang telah dilaksanakan:



## 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Urusan yang dilaksanakan pada program ini yaitu:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional
4. Penanganan konflik sosial
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kesbangpol melaksanakan urusan pemerintahan umum, terdiri dari :
  6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
  7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

2. Analisis Capaian Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.9**

**Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTERPRETASI
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat</b>				
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	12,6%	12,6%	100%	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja dapat tercapai dengan “Sangat Memuaskan” yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan intervensi Pemerintah Daerah. Terselenggaranya pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik masyarakat merupakan upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target Indikator Capaian Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan dalam peran dan partisipasi parpol sebagai mitra Pemerintah dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

Indikator Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat ini didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat} &= \frac{\text{Jumlah Orang yang Mendapatkan Wawasan Politik}}{\text{Jumlah Pemilih Tetap}} \times 100 \\ &= \frac{12.098.016}{96.016 \text{ Orang}} \times 100 \end{aligned}$$

- b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dalam Beberapa Tahun Terakhir  
Guna mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut adalah tabel data perkembangan empat tahun terakhir pelaksanaan rencana kerja untuk mencapai target indikator Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat:

**Tabel 3.10**

**Perbandingan antara Capaian Kinerja dalam Beberapa Tahun Terakhir**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
2021	1,2%	1,2%	100%	26,3%
2022	2,9%	2,9%	100%	13,6%
2023	7,8%	7,8%	100%	36,6%
2024	12,6%	12,6%	100%	59,2%

Kinerja atas target Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang konsisten sehingga Masyarakat semakin memahami dan menyadari tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik.

- c. Perbandingan Kinerja Kumulatif Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra  
Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam melaksanakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan periode 2021-2026.  
Perbandingan capaian kinerja kumulatif dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Kinerja Kumulatif dengan Target Akhir Renstra**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	12,6%	21,6%	59,2%

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 berhasil mencapai target 12,6% namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka baru tercapai sebesar 59,2%. Untuk selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan akan mengupayakan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten Lain atau Standar Nasional

IKU yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berbeda dengan Kabupaten/Daerah lain sehingga tidak dapat diperbandingkan.

IKU yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan adalah Indeks Demokrasi Indonesia Kalsel. Indikator ini berbeda dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Badan Kesatuan Bangsa berada dibawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sehingga tidak ditemukan IKU khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

❖ Pendorong Keberhasilan

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak guna mencapai target kinerja Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Komitmen pimpinan dan keterlibatan pemangku kebijakan
2. Terselenggaranya pendidikan politik masyarakat
3. Meningkatnya peran dan partisipasi parpol sebagai mitra Pemerintah

❖ Hambatan

Meskipun target telah tercapai dengan baik, namun pada proses pencapaian tetap ditemukan beberapa hambatan yang berisiko menghambat keberhasilan. Hambatan tersebut diantaranya:

1. Belum optimalnya SDM parpol baik pengurus ataupun simpatisan  
Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi memiliki peran yang sangat vital, salah satunya adalah mempersiapkan pemimpin nasional, Atas dasar tersebut, partai politik sangat dituntut untuk

memiliki mekanisme kaderisasi yang baik. Kurangnya SDM parpol dapat menjadi penghambat dalam upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin di masa depan

2. Perbedaan karakteristik sosial di masyarakat

Perbedaan karakteristik yang ada di masyarakat seperti adat budaya, agama dan tradisi dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi konflik.

3. Masifnya penyebaran berita rekayasa (hoax) yang dapat membuat masyarakat ragu untuk berpartisipasi dalam politik.

Kecanggihan teknologi dapat membawa dampak negative, salah satunya menambah maraknya informasi rekayasa (hoax) yang semakin mirip dengan informasi asli sehingga dapat menyesatkan dan memprovokasi masyarakat

❖ Alternatif Solusi

Berdasarkan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, maka muncullah beberapa pemikiran sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga diharapkan di kemudian hari masalah serupa tidak akan timbul lagi. Alternatif solusi tersebut antara lain:

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan pembekalan melalui pendidikan politik bagi masyarakat khususnya pelajar sebagai pemilih pemula.

Upaya ini dilaksanakan melaalui kegiatan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Balangan. Kegiatan diikuti oleh siswa yang masuk dalam kategori pemilih pemula.

2. Menjaga hubungan yang harmonis dengan parpol sehingga mampu meningkatkan peran dan partisipasi parpol dalam memberikan Pendidikan politik pada masyarakat.

Beberapa upaya demi menjaga keharmonisan dalam hubungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Balanagan diantaranya yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik dan intens dengan parpol, mengadakan rapat-rapat koordinasi dan dukungan anggaran berupa hibah bagi parpol

- f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan ditunjang oleh 1 program, 1 kegiatan seperti yang tampak pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**

**Kinerja Program Penunjang**

**Indikator Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat**

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang Aktif	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa program yang menunjang indikator Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat telah berhasil mencapai target 100%.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Dalam pelaksanaannya program ini didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Strategi yang telah dijalankan untuk mencapai target indikator ini adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik di masyarakat

Upaya ini dilaksanakan melaalui kegiatan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Balangan. Kegiatan diikuti oleh siswa yang masuk dalam kategori pemilih pemula

2. Sosialisasi dan praktik langsung tentang kepemiluan dan peran generasi muda dalam pembangunan, diselenggarakan di sekolah-sekolah menengah atas dan sederajat
3. Menjaga kerjasama yang baik dengan parpol dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat.  
Beberapa upaya demi menjaga keharmonisan dalam hubungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Balangan diantaranya yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik dan intens dengan parpol, mengadakan rapat-rapat koordinasi dan dukungan anggaran berupa hibah bagi parpol dan unit terkait

### 3.3 Realisasi Anggaran

Disamping penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Perhitungan nilai kinerja anggaran didapat dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Total Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100$$

Tabel berikut menggambarkan uraian pagu dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024:

**TABEL 3.12**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

IKU	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
IKU 1:		13.623.032.400,00	11.764.120.624,00	86,4%
Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan				
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	5.572.912.700,00	5.420.712.050,00	97,3%
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	727.250.600,00	546.943.775,00	75,2%
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	493.599.600,00	393.590.188,00	79,8%

	Sosial dan Budaya			
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.829.269.500,00	5.403.114.926,00	79,1%
IKU 2: Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat		33.304.075.811,00	31.704.655.089,00	95,02%
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	33.304.075.811,00	31.704.655.089,00	95,02%
Program Penunjang				
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.369.622.765,00	7.605.104.596,00	90,1%
<b>Total</b>		<b>55.296.730.967,00</b>	<b>51.074.120.624,00</b>	<b>92,4%</b>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan, pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024 sebesar Rp. 55.296.730.967,00. Anggaran ini mendanai 5 program penunjang IKU dan 1 program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan. Anggaran tersebut dapat diserap sebanyak Rp. 51.074.120.624,00 dengan capaian 92,4%.

Sedangkan pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tahun 2024 per Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
<b>08.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.369.622.756</b>	<b>7.605.104.596</b>	<b>90,87%</b>
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>464.617.400</b>	<b>405.616.518</b>	<b>87,30%</b>
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	363.543.300	306.013.458	84,18%
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	17.531.600	17.531.460	100,00%
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	9.644.000	9.644.000	100,00%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.898.500	72.427.600	98,01%

<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.378.473.106</b>	<b>3.917.991.567</b>	<b>89,48%</b>
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.252.552.506	3.800.739.367	89,38%
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.042.000	3.042.000	100,00%
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	122.878.600	114.210.200	92,95%
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>211.474.500</b>	<b>186.531.010</b>	<b>88,20%</b>
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.634.500	62.125.000	86,72%
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	139.840.000	124.406.010	88,96%
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.385.215.100</b>	<b>1.324.182.306</b>	<b>95,59%</b>
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.785.000	10.716.500	99,36%
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	718.475.300	661.394.100	92,06%
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.741.500	10.740.000	99,99%
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	2.880.000	87,27%
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	641.913.300	638.451.706	99,46%
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.173.783.000</b>	<b>1.133.200.000</b>	<b>96,54%</b>
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.173.783.000	1.133.200.000	96,54%
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>388.853.000</b>	<b>338.059.695</b>	<b>86,94%</b>
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	131.100.000	131.100.000	100,00%
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.745.000	90.377.725	65,61%
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.620.000	14.336.500	98,06%
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.388.000	102.245.470	97,02%
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.206.650</b>	<b>299.523.500</b>	<b>81,57%</b>
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.625.250	179.123.500	78,69%
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.581.400	120.400.000	86,26%
<b>08.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>5.572.912.700</b>	<b>5.420.712.050</b>	<b>97,27%</b>
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan</b>	<b>5.572.912.700</b>	<b>5.420.712.050</b>	<b>97,27%</b>

	<b>Karakter Kebangsaan</b>			
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	71.474.800	65.652.966	91,85%
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.566.235.900	1.512.893.384	96,59%
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.927.076.000	3.834.986.900	97,66%
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.126.000	7.178.800	88,34%
<b>08.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>33.304.075.811</b>	<b>31.704.655.089</b>	<b>95,20%</b>
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>33.304.075.811</b>	<b>31.704.655.089</b>	<b>95,20%</b>
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	265.132.000	115.261.534	43,47%
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.086.114.840	30.752.740.322	95,84%
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	952.828.971	836.653.233	87,81%
<b>08.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>727.250.600</b>	<b>546.943.775</b>	<b>75,21%</b>
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>727.250.600</b>	<b>546.943.775</b>	<b>75,21%</b>
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	318.175.600	261.134.700	82,07%
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	409.075.000	285.809.075	69,87%
<b>08.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>493.599.600</b>	<b>393.590.188</b>	<b>79,74%</b>
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>493.599.600</b>	<b>393.590.188</b>	<b>79,74%</b>

8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	22.472.000	17.931.100	79,79%
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	269.718.600	200.297.500	74,26%
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	182.863.000	160.151.588	87,58%
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18.546.000	15.210.000	82,01%
<b>08.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>6.829.269.500</b>	<b>5.403.114.926</b>	<b>79,12%</b>
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>6.829.269.500</b>	<b>5.403.114.926</b>	<b>79,12%</b>
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	119.294.500	115.239.900	96,60%
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1.614.536.000	1.503.553.175	93,13%
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	200.336.000	118.704.950	59,25%
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1.584.830.000	1.580.113.000	99,70%
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3.310.273.000	2.085.503.901	63,00%
<b>TOTAL</b>		<b>55.296.730.967</b>	<b>51.074.120.624</b>	<b>92,36%</b>

### 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan anggaran.

Untuk efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran (Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator)}}{\text{Pagu Anggaran (Program/Kegiatan yang Mendukung Indikator)}} \times 100$$

Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

**TABEL 3.13**  
**Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya**

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFEKTIFITAS	TINGKAT EFISIENSI
<b>SASARAN 1 :</b>					
<b>MENINGKATNYA PEMETAAN DAERAH POTENSI KONFLIK</b>					
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	97,3%	Efektif	Sangat Efisien
2.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	75,2%	Efektif	Sangat Efisien
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	79,8%	Efektif	Sangat Efisien
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100%	79,1%	Efektif	Sangat Efisien
<b>SASARAN 2 :</b>					
<b>MENINGKATNYA WAWASAN POLITIK MASYARAKAT</b>					
1.	Program Peningkatan Peran Partai Pollitik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	95,02	Efektif	Sangat Efisien

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas kegiatan mencapai 100% pada kedua indikator utama.

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan adalah 13,6%, sedangkan pada indikator Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat adalah 4,98%. Kedua indikator adalah memiliki tingkat efisiensi <60% sehingga masuk dalam kriteria “Sangat Efektif” dalam penggunaan sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Baalangan.

### 3.5 Kinerja Lainnya

#### 1. Penghargaan

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan beberapa penghargaan. Penghargaan tersebut adalah:

1. Piagam penghargaan diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024



2. Piagam penghargaan diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan atas dedikasi dan kerjasamanya dalam mendukung pengawasan serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan



## 2. Inovasi

Badan Kesatuan Bangsa memiliki beberapa inovasi yang mendukung Indikator Kinerja Utama, yaitu:

### 1. KAJEMBER (Kami Jemput Berkas)

Merupakan inovasi sistem jemput bola ke lokasi ormas yang akan mendaftarkan diri. Inovasi ini mempermudah ormas yang ingin mendaftarkan organisasinya ke Kementerian namun terhalang jarak maupun fasilitas. Inovasi ini juga dapat mempermudah pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di Kabupaten Balangan

### 2. SIKANDA (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah)

Inovasi ini adalah inovasi tentang sistem kewaspadaan dini terhadap potensi konflik di daerah dengan berbasis *website*. Melalui layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah terkait serta dapat menghasilkan informasi situasi daerah secara cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya inovasi ini kondisi kerjapun diharapkan dapat lebih efektif dan efisien.

### 3. SI PETES UREN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN)

Merupakan inovasi layanan tes urine untuk mendeteksi secara dini penggunaan narkoba di kalangan ASN. Sasaran dari layanan ini adalah seluruh ASN di Kabupaten Balangan. Dengan adanya layanan ini , diharapkan seluruh ASN dapat selalu terpantau sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba.

### 4. SPEAKING (Sistem Informasi Penanganan Konflik Kabupaten Balangan)

Ini merupakan sistem dokumen laporan penanganan konflik yang terstandar dan baku sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan.

3. Rencana Aksi atas LHE SAKIP Tahunan dari Inspektorat

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Balangan, nilai yang didapatkan untuk implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah 75,90 dengan predikat "BB". Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 73,80 dengan predikat "BB".

Berikut adalah tabel rincian hasil penilaian SAKIP tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan:

**Tabel 3.14**  
**Rincian Hasil Penilaian SAKIP**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai AKIP 2022		Nilai AKIP 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,40	30,00	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,40	30,00	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	15,00	11,55
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	100	18,75	25,00	18,75
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>73,80</b>	<b>100</b>	<b>75,90</b>
<b>Predikat AKIP</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>	

1. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Dalam proses evaluasi AKIP pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, Inspektorat Balangan memberikan rekomendasi agar menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Rekomendasi tersebut, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV ditandatangani setiap Pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui Pimpinan SKPD

2. Pengukuran Kinerja

Monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV ditandatangani setiap Pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui Pimpinan SKPD

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandinganrealisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

- b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD/Pemda dengan data realisasi capaian Nasional
- c. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan tentang hambatan/kendala selama pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintahan, terutama penjelasan detail mengenai hambatan yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai sesuai target kinerja

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Laporan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya agar sepenuhnya ditindaklanjuti dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya.

## 2. Tindaklanjut Perbaikan atas LHE SAKIP

Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan maka disusunlah rencana aksi atas LHE SAKIP Tahunan dari Inspektorat.

Rencana aksi tersebut adalah:

### 1. Perencanaan Kinerja

Melampirkan dokumen monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

### 2. Pengukuran Kinerja

Melampirkan dokumen monitoring evaluasi triwulan I, II, III dan IV yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Melampirkan dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan
- c. Menginfokan tentang hambatan/kendala selama pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pemerintah pada dokumen Laporan Kinerja, terutama penjelasan detail mengenai hambatan yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai sesuai target kinerja

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti sepenuhnya laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKIP) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). LKIP yang disusun dan disajikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan gambaran tentang pelaksanaan kinerja serta anggaran program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Dari 2 Indikator Kinerja Utama yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dengan Bupati Balangan, seluruhnya berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 51.074.120.624,00 dengan capaian 92,4% dari pagu anggaran Rp. 55.296.730.967,00

Pada hasil analisis penggunaan Sumber Daya menunjukkan bahwa kedua indikator memiliki tingkat efisiensi <60% sehingga masuk dalam kriteria “Sangat Efisien” dalam penggunaan sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Selain kinerja terhadap indikator dan anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga melaporkan adanya kinerja lain seperti penghargaan dan inovasi yang diharapkan dapat semakin mendukung tercapainya target indikator kinerja.

Di masa mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja ASN di Lingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan berdasarkan hasil evaluasi internal dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) tahunan dari Inspektorat.